

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. 2016. *Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada*. Jakarta.
- Elin, Falquera, Samuel Jones, dan Magnus Ohman. 2016. *Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu: Buku Pedoman Keuangan Politik*. Swedia: International IDEA.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Handbook on Monitoring Election Campaign Finance*, 2005, Open Society Justice Initiative.
- Indonesian Corruption Watch. 2016. *Laporan pemantauan ICW terhadap tren penanganan kasus korupsi. 2016*. Jakarta: ICW.
- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). 2015. *"Persoalan Dana Kampanye 2015, Hasil Pemantauan Dana Kampanye kepada 27 Pasangan Calon di 9 Daerah Pilkada*. Jakarta: JPPR.
- Karl-Heinz Nassmacher. dikutip dari *Modul Pemantauan Dana Kampanye ICW*. 2004, Jakarta.
- Larry Powell, 2010. *"Political Parties and the Finance Law"* dalam Melissa M. Smith, Glenda C. Williams, Larry Powell, and Gary A. Copeland, *Campaign Finance Reform: The Political Shell Game*, Maryland: Lexington Books.
- Minan, Ahsanul. *Politik Hukum Pengaturan Dana Kampanye Partai Politik: Studi Komperatif Mengenai Pengaruh Perubahan Konstalasi Politik terhadap Pengaturan Tentang dana Kampanye dalam Pemilu Tahun 1999, 2004, dan 2009*.
- Nugroho, Riant. 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik-Kebijakan sebagai The Fifth Estate- Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ohman, Magnus (editor). 2013. *Pelatihan Deteksi dan Penegakan (TIDE): Buku Pedoman Pengawasan Keuangan Politik*, Washington: IFES.
- Ohman, Magnus & Zainulbhai, Hani, 2009, *Regulating Political Finance, The Global Experience*. Washington: IFES.

Podger, Owen. 2016, *Membangun Akuntabilitas untuk Menyukseskan Pemilu-Kada*, Professional Associate Institute for Governance and Policy Analysis University of Canberra. Makalah disampaikan pada seminar Nasional catatan terhadap Ketentuan Politik Uang di Dalam Revisi Kedua UU Pilkada, Auditorium FH Universitas Trisakti, 21 Juli 2016.

Rooseno. 2014. *Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011*. Jakarta.

Surbakti, Ramlan. 2015. *Peta Permasalahan dalam Keuangan Politik Indonesia*. Jakarta: Kemitraan.

Supriyanto, Didik, Lia Wulandari, Armanda Pransiska, dan Catherine Natalia. 2015. "*Dana Kampanye Pilkada: Pengaturan Teknis tentang Sumbangan, Pengeluaran, dan Pelaporan Berdasarkan UU No 1/2015 Juncto UU No 8/2015*". Jakarta: Yayasan Perludem.

Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. 2013. *Basa-basi Dana Kampanye "Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu"*. Jakarta: Yayasan Perludem.

Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. 2013. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye*, Jurnal 5 Pemilu dan Demokrasi, Jakarta: Yayasan Perludem.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad: Bandung.

Teten Masduki. 2008. *Urgensi Pengawasan Dana Kampanye Pemilu*, Jakarta.

Wayne, Pearsons. 2001. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Yin, Robert K. 2005. *Studi Kasus, Desain & Metode*. Terjemahan M. Djauzi Mudzakir. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Penelusuran Internet

<http://harianhaluan.com/news/detail/44996/> diakses pada 16 Desember 2016.

<http://www.antarasumbar.com/berita/162770/pansus-pilgub-selesaikan-dugaan-pelanggaran.html> diakses pada 6 Desember 2016.

<http://m.antarajambi.com/berita/312082/efektivitas-kampanye-pilkada-di-tangan-kpu>. diakses pada 20 Januari 2015.

<http://bandungekspres.co.id/2016/ada-keganjilan-pada-uu-pilkada-tentang-dana-kampanye> diakses pada 25 Januari 2015.

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/07/220692/panw> diakses pada 25 Januari 2015

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan Daerah tentang langkah implementasi kebijakan.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019

Putusan Nomor 54-55/DKPP-PKE-IV/2015 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Putusan Nomor 94/DKPP-PKE-V/2016 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Putusan PN Padang Nomor 94/DKPP-PKE-IV/2016

Laporan

Laporan Akuntan Independen KAP Heliantono dan Rekan, Nomor:15/12/081/07/KAP-6/151

Laporan Akuntan Independen KAP Armanda dan Ernita, Nomor: 06/AUP-ES/2015

Laporan Akuntan Independen KAP DRS Rinaldi Munaf, Nomor: 188/RM-12/2015

Kajian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/LP/PILGUB/IX/2015

Kajian temuan Bawaslu Nomor 09/TM/PILGUB/X/2015

Bahan RDP KPU RI dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 22 Juni 2015

Bahan RDP KPU RI dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 4 Mei 2015